

2016

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER I



Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

LBMN I - 416/PW07/1/2016
Tanggal 28 Juli 2016

PERWAKILAN
BPKP PROVINSI
SUMATERA
SELATAN

**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN**

**PERWAKILAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

Laporan Barang Milik Negara

Semester I

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2016

Jalan Bank Raya 2, Demang Lebar Daun

Palembang

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan BMN dengan menyusun Laporan BMN berupa Laporan Posisi BMN di Neraca dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.

Penyusunan Laporan BMN Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan BMN ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan. Disamping itu, Laporan BMN ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palembang, 28 Juli 2016

Plh. Kepala Perwakilan

Your Happy
NIP 19601028 198112 1 001

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA	1
A. PENDAHULUAN	1
1. Dasar Hukum	1
2. Entitas Pelaporan	2
3. Periode Laporan	3
B. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA	4
1. Kapitalisasi	4
2. Penyusutan Aset Tetap	4
C. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN	6
D. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA	7
1. Saldo Awal	7
2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara	7
3. Barang Milik Negara Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2016	
E. INFORMASI BMN LAINNYA	20
1. Perkembangan Nilai BMN	21
2. Informasi Pengelolaan BMN	22
3. BMN dari Dana Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan	22
4. BMN pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum	22
5. BMN dari Dana Belanja Lain-lain	22
6. Informasi Terkait BMN yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang	23
	23
LAMPIRAN	
LAPORAN POSISI BMN DI NERACA	
LAPORAN BARANG PERSEDIAAN	
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA INTRAKOMPTABEL	
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA EKSTRAKOMPTABEL	
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA GABUNGAN	
LAPORAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
LAPORAN ASET TAK BERWUJUD	
LAPORAN BARANG BERSEJARAH	
LAPORAN PENYUSUTAN	
LAPORAN BARANG HILANG	
LAPORAN BARANG RUSAK BERAT	
LAPORAN BPYBDS	
BERITA ACARA REKONSILIASI (DJKN)	
BERITA ACARA REKONSILIASI (KPKNL)	

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 125 /PMK.06/2011 tentang Pengelolaan BMN yang Berasal dari Dana DK/TP sebelum TA 2011
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan BMN yang Berasal dari Dana DK/TP sebelum TA 2011
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 /PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pusat pada Pemerintah Pusat
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua
- p. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.06/2015 tentang Modul Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pemerintah Pusat
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
- r. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrua pada Laporan Keuangan;
- s. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;
- t. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- u. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2/KN/2014 hal Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Penyusutan BMN, dan Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun 2014

2. Entitas pelaporan

Dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (BMN), Kementerian Negara/Lembaga wajib membentuk Unit Akuntansi Barang. Unit Akuntansi Barang terdiri dari:

- a. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB),
- b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1),
- c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), dan
- d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

UAPB merupakan unit akuntansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga

(Pengguna Barang) dengan penanggungjawab Menteri/Pimpinan Lembaga. UAPPB-E1

merupakan unit akuntansi pada tingkat eselon I dengan penanggungjawab pejabat eselon I. UAPPB-W merupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah yang melakukan pengabungan laporan keuangan seluruh UAKPB instansi vertikal Kementerian Negara/Lembaga di wilayahnya dengan penanggungjawab Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Satuan Kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W. Sedangkan UAKPB merupakan unit akuntansi pada tingkat satuan kerja (Kuasa Pengguna Barang) yang memiliki wewenang menguasai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan penanggungjawab Kepala Satuan Kerja.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan merupakan unit akuntansi dengan fungsi rangkap. Dengan kata lain, selain sebagai UAKPB, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan juga merupakan UAPPB-W yang memiliki wewenang menguasai BMN di lingkungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Milik Negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan ini disusun dan disajikan untuk periode tahunan TA 2016 (periode yang berakhir 30 Juni 2016).

B. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

1. Kapitalisasi

Laporan BMN ini dihasilkan melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Penyusunan dan penyajian Laporan BMN Semester I Tahun 2016 ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

2. Penyusutan Aset Tetap

Penyusunan Laporan BMN Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Semester I Tahun Anggaran 2016 sudah menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK/.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap dengan beberapa ketentuan dasar:

- a. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- b. Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 30 Juni 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 30 Juni 2012. Sedangkan untuk aset tetap yang diperoleh setelah 30 Juni 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- c. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- d. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- e. Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2014 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum table masa manfaat tersebut adalah:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

C. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Barang Milik Negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Periode Semester I Tahun 2016 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Semester I Tahun 2016 ini adalah sebesar Rp 44.054.887.541,- (Empat puluh empat milyar lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) dan nilai mutasi yang terjadi selama periode Semester I Tahun 2016 sebesar Rp 439.910.000,- (Empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non keuangan merupakan transaksi penambahan dan/atau pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca
2. Laporan Barang Persediaan
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan)
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
5. Laporan Aset tak Berwujud
6. Laporan Barang Bersejarah
7. Laporan Kondisi Barang (Untuk Tahunan)
8. Laporan Penyusutan
9. Laporan Barang Hilang yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang
10. Laporan Barang Rusak Berat yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara
13. Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAK-SIMAK pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

D. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2016

1. Saldo Awal

Nilai BMN per 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp44.054.887.541,- Jumlah ini terdiri dari nilai BMN *intrakomptabel* (nilai BMN yang disajikan di Neraca) sebesar Rp44.054.400.541,- dan nilai BMN *ekstrakomptabel* sebesar Rp487.000,-.

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Mutasi BMN pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut.

a. Persediaan

Saldo Persediaan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2016 sebesar Rp180.502.031,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp180.502.031,- dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp1.882.380,- jumlah tersebut dapat dirinci:

Kode	Akun	Saldo Awal	Saldo Akhir	Mutasi
(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) – (4)
117111	Barang Konsumsi	Rp158.234.251	Rp162.321.016	(Rp4.086.765)
117113	Barang untuk Pemeliharaan	Rp4.599.625	Rp4.440.700	(Rp.158.925)
117114	Suku Cadang	Rp0	Rp0	Rp 0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	Rp0	Rp0	Rp 0
117131	Bahan Baku	Rp0		
117199	Persediaan Lainnya	Rp15.785.775	Rp13.740.315	(Rp2.045.460)
Jumlah		Rp178.619.651	Rp180.502.031	Rp1.882.380

Tidak terdapat barang persediaan yang dalam kondisi rusak berat dan usang

b. Tanah

Saldo Tanah pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2016 Rp22.560.845.000,00 untuk 32.478 m²/ 17 persil. Tidak terdapat mutasi tambah atau kurang pada kelompok barang ini.

Dari jumlah/nilai Tanah di atas, tidak terdapat tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Tidak terdapat Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah

Tidak terdapat permasalahan pada BMN berupa Tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

c. Peralatan & Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2016 adalah sebanyak 2.258 unit sebesar Rp5.695.122.551,00 Jumlah tersebut berasal dari saldo awal sebanyak 2.258 sebesar Rp5.695.122.551,00, tidak terdapat mutasi tambah dan tidak terdapat mutasi kurang .

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut.

1) 3.01. 03 Alat Bantu

Saldo Alat Bantu berupa alat besar Genset dan Water Pump pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2016 adalah sebanyak 5 unit dengan nilai sebesar Rp360.886.502,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 5 unit dengan nilai sebesar Rp360.886.502,00

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini untuk periode 30 Juni 2016.

Tidak terdapat Alat Bantu (alat besar) yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Rincian data Alat Bantu berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	5 Unit	Rp360.886.502,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada kelompok Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

2) 3.02. Alat Angkutan

Saldo Alat Angkutan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2016 adalah sebanyak 16 unit dengan nilai sebesar Rp1.073.096.100,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 16 unit dengan nilai sebesar Rp1.073.096.100,00

Jumlah alat angkut kendaraan roda empat berupa minibus sebanyak 10 unit dengan nilai sebesar 963.920.000, sedan 1 unit dengan nilai sebesar 65.120.000 dan jumlah kendaraan roda dua sebanyak 5 unit dengan nilai sebesar 44.056.100.

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini untuk periode 30 Juni 2016.

Tidak terdapat Alat Angkutan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Rincian data Alat Angkutan berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	16 Unit	Rp 1.073.096.100
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada kelompok Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

3) 3.03. Alat Bengkel & Alat Ukur

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2016 adalah sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp550.000,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 3 unit dengan nilai sebesar Rp 1.333.940,- dan terdapat mutasi kurang pada kelompok barang ini sebesar Rp783.940,00 (penghapusan BMN tahun 2015)

Tidak terdapat Alat Bengkel dan Alat Ukur yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Rincian data Alat Bengkel dan Alat Ukur berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	1 Unit	Rp 550.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat		

Tidak ada kelompok Alat Bengkel dan Alat Ukur yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

4) 3.04. Alat pertanian

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2016 tidak memiliki saldo Alat Pertanian.

5) 3.05. Alat Kantor & Alat Rumah Tangga

Saldo Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2016 adalah sebanyak 1.971 unit dengan nilai sebesar Rp2.500.583.700,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1.974 unit dengan nilai sebesar Rp2.500.808.700,00 terdapat mutasi kurang sebesar Rp225.000,00 sebanyak 3 unit pada kelompok barang ini.

(penghapusan BMN tahun 2015)

Terdapat mutasi tambah atau kurang pada kelompok Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga.

Tidak terdapat Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Rincian data Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	1.971 Unit	Rp2.500.583.700,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tida terdapat kelompok Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

6) 3.06. Alat Studio, Komunikasi, & Pemancar

Saldo Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2016 adalah sebanyak 64 unit dengan nilai sebesar Rp447.914.270,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 64 unit dengan nilai sebesar Rp447.914.270,00 dan tidak terdapat mutasi tambah pada kelompok barang ini.

Tidak terdapat Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Rincian data Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	64 unit	Rp 447.914.270,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada kelompok Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

7) 3.07. Alat Kedokteran & Kesehatan

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2016 adalah sebanyak 4 unit dengan nilai sebesar Rp 2.164.000,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 4 unit dengan nilai sebesar Rp 2.164.000,00 dan tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini.

Tidak terdapat Alat Kedokteran dan Kesehatan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan tidak ada proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Alat Kedokteran dan Kesehatan berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	4 unit	Rp 2.164.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak terdapat kelompok Alat Kedokteran dan Kesehatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

8) 3.08. Alat Laboratorium

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2016 tidak memiliki saldo Alat Laboratorium.

9) 3.09. Alat Persenjataan

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2016 tidak memiliki saldo Alat Persenjataan.

10) 3.10. Komputer

Saldo Komputer pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2016 adalah sebanyak 194 dengan nilai sebesar 1.309.404.018,00 jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 194 unit dengan nilai sebesar Rp1.309.404.018,00, tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada kelompok barang ini dengan rincian sebagai berikut

Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
P.C. Lenovo All in one	15 Unit	Rp 98.939.250,00
Note Book Acer	3 Unit	Rp 25.822.000,00
Printer	11 Unit	Rp 25.819.750,00
Lap Top	1 Unit	Rp 6.085.000,00
Scanner	1 Unit	Rp 6.600.000,00
Jumlah	29 Unit	Rp163.266.500,00

Tidak terdapat Komputer yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan tidak ada proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Komputer berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	194 Unit	1.309.404.018,00
Rusak Ringan	-	-

ada kelompok Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

10) 3.11. Alat Eksplorasi

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2016 tidak memiliki saldo Alat Eksplorasi.

11) 3.12. Alat Pengeboran.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2016 tidak memiliki saldo Alat Pengeboran.

12) 3.13. Alat Produksi, Pengolahan, & Pemurnian

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2016 tidak memiliki saldo Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian.

13) 3.14. Alat Bantu Eksplorasi

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2016 tidak memiliki saldo Alat Bantu Eksplorasi.

14) 3.15. Alat Keselamatan Kerja

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2016 tidak memiliki saldo Alat Keselamatan Kerja.

15) 3.16. Alat Peraga

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2016 tidak memiliki saldo Alat Peraga.

16) 3.17. Peralatan Proses/Produksi

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2016 tidak memiliki saldo Peralatan Proses/Produksi.

17) 3.18. Rambu-rambu

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2016 tidak memiliki saldo Rambu-rambu.

18) 3.19. Peralatan Olahraga

Saldo Peralatan Olahraga pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2016 adalah sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp299.000,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp299.000,00 dan tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini.

Tidak terdapat Peralatan Olahraga yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, tidak ada yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Peralatan Olahraga berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	1 Unit	Rp 299.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada kelompok Peralatan Olahraga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

20) Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp4.689.714.919,00

terdiri dari nilai BMN *intrakomptabel* (nilai BMN yang disajikan di Neraca) sebesar Rp5.695.122.551,00 dan nilai BMN *ekstrakomptabel* sebesar Rp487.000,00.

d. Gedung & Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Perwakilan BPKP Provinsi Per 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp15.539.111.990,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp15.099.201.990,- terdapat mutasi tambah sebesar Rp439.910.000,00,-

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang:.

1) 4.01. Bangunan Gedung

Saldo Bangunan Gedung pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2016 adalah sebanyak 73 unit dengan nilai Rp 15.539.111.990,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 73 unit dengan nilai sebesar Rp15.099.201.990,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp439.910.000,00

Rincian mutasi tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
Pengembangan Langsung	-	-
Bangunan Gedung Kantor	Rp	
Rumah Negara Gol I tipe B /D Permanen	Rp159.500.000,00	
Rumah Negara Gol I tipe C Permanen	Rp36.766.000,00	
Rumah Negara Gol II tipe E Darurat	Rp147.600.000,00	
Rumah Negara Gol II tipe E semi Darurat	Rp96.044.000,00	
Jumlah	Rp439.910.000,00	

Tidak terdapat Bangunan Gedung yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan tidak terdapat proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Bangunan Gedung berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	73 Unit	Rp15.150.328.359,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	15 Unit	Rp 388.783.631-

Saldo Bangunan Gedung pada posisi 30 juni 2016 sebesar Rp15.539.111.990,00 terdapat rumah negara statusnya yang dihentikan dari penggunaannya sebanyak 15 unit terdiri dari 11 unit lokasi di seduduk putih sebesar Rp.209.099.726,00 dan 4 unit lokasi di lebak rejo sekip sebesar Rp. 98.683.905,00.

2) **4.02. Monumen**

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera selatan per 30 Juni 2016 tidak memiliki saldo Monumen.

3) **4.03. Bangunan Menara**

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2016 tidak memiliki saldo Bangunan Menara.

4) **4.04. Tugu Titik Kontrol/Pasti**

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2016 adalah sebanyak 14 unit dengan nilai sebesar Rp334.944.000,00 (tanda batas administrasi kepemilikan).

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini untuk periode 30 Juni 2016 Tahun Anggaran 2016.

Tidak terdapat Tugu Titik Kontrol/Pasti yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Rincian data Tugu Titik Kontrol/Pasti berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	14 Unit	Rp334.944.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada kelompok Tugu Titik Kontrol/Pasti yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

5) Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp2.845.841.469,00 jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp2.641.115.781,00 mutasi kurang oleh akumulasi penyusutan sebesar Rp. 204.725.688,00.

e. Jalan, Irigasi, dan jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp180.921.000,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp180.921.000,00, tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini.

1) 5.01. Jalan & jembatan

Saldo jalan dan Jembatan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

Per 30 Juni 2016 adalah sebanyak 9 unit dengan nilai sebesar Rp173.421.000,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 9 unit dengan nilai sebesar Rp 173.421.000,00, dan tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini.

Tidak terdapat Jalan dan Jembatan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan tidak ada proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Jalan dan Jembatan berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	9 Unit	Rp 173.421.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak terdapat kelompok Jalan dan Jembatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

2) 5.02. Bangunan Air

Saldo Bangunan Air pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2016 adalah sebanyak 6 unit dengan nilai sebesar Rp7.500.000,00

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 6 unit dengan nilai sebesar Rp7.500.000,00 tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini.

Tidak terdapat Bangunan Air yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan tidak terdapat prose penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Bangunan Air berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	6 Unit	Rp 7.500.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak terdapat kelompok Bangunan Air yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

3) 5.03. Instalasi

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2016 tidak memiliki saldo Instalasi.

4) 5.04. Jaringan

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2016 tidak memiliki saldo Jaringan.

5) Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan, Irigasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan, Irigasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp1.249.0740,00

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2016 adalah sebanyak 1.447 buah sebesar Rp78.400.000,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp78.400.000,00, tidak terdapat mutasi kurang pada kelompok barang ini.

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut.

1) 6.01. Bahan Perpustakaan

Saldo Bahan Perpustakaan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2016 adalah sebanyak 1.446 unit dengan nilai sebesar

Rp63.050.000,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1.446 unit dengan nilai sebesar Rp63.050.000,00 tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini.

Dari jumlah/nilai Bahan Perpustakaan di atas, tidak terdapat Bahan Perpustakaan yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan tidak ada yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Bahan Perpustakaan berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	1.446 unit	Rp63.050.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak terdapat kelompok Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

2) **6.02. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga**

Saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga pada Perwakilan

BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2016 adalah sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp15.350.000,00 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp15.350.000,00 tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada kelompok barang ini.

Dari jumlah/nilai Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga di atas, tidak terdapat Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, dan tidak ada yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga berdasarkan status kondisinya:

Kondisi	Kuantitas	Nilai
Baik	1 unit	Rp15.350.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak terdapat kelompok Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

3) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp15.350.000,00

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2016 tidak memiliki KDP.

h. Aset Lainnya

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2016 tidak memiliki Aset lainnya.

1) Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2016 tidak memiliki Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

2) Aset Tak Berwujud

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2016 tidak memiliki Aset Tak Berwujud.

3) BMN yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2016 tidak memiliki saldo Saldo BMN yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah.

i. BMN Berupa Aset Bersejarah

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2016 tidak memiliki BMN Berupa Aset Bersejarah.

3. BMN pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2016

a. BMN Per Akun Neraca

Nilai BMN pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp44.054.887.541,- (diisi gabungan *ekstrakomptabel & intrakomptabel*). Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca, yaitu Persediaan,

Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian:

Neraca	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
Aset Lancar			
Persediaan	Rp180.502.031	Rp 0	Rp180.502.031
Sub Jumlah A	Rp180.502.031	Rp 0	Rp180.502.031
Aset Tetap			
Tanah	Rp22.560.845.000	Rp 0	Rp22.560.845.000
Peralatan & Mesin	Rp5.695.122.551	Rp 487.000	Rp5.695.609.551
Gedung & Bangunan	Rp15.539.111.990	Rp 0	Rp15.539.111.990
Jalan dan Jembatan, Irigasi	Rp180.921.000	Rp 0	Rp180.921.000
Aset Tetap Lainnya	Rp78.400.000	Rp 0	Rp78.400.000
KDP	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Sub Jumlah B	Rp44.054.400.541	Rp 487.00	Rp44.054.887.541
Aset Lainnya			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Aset Tak Berwujud	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Ops. Pemerintah	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Sub Jumlah C	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Total	Rp44.054.400.541	Rp .487.000	Rp44.054.887.541

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2016 per Perkiraan Neraca:

Neraca	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
Aset Tetap			
Peralatan & Mesin	Rp4.689.714.919	Rp.487.000	Rp4.690.201.919
Gedung & Bangunan	Rp2.845.841.469	Rp0	Rp2.845.841.469
Jalan, Irigasi, & Jaringan	Rp174.784.608	Rp0	Rp174.784.608
Aset Tetap Lainnya	Rp15.350.000	Rp0	Rp15.350.000
KDP	Rp0	Rp0	Rp0
Sub Jumlah A	Rp7.725.690.996	Rp.487.000	Rp7.726.177.996
Aset Lainnya			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Sub Jumlah B	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Total	Rp7.725.690.996	Rp.487.000	Rp7.726.177.996
Aset Lainnya			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Sub Jumlah B	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Total	Rp7.725.690.996	Rp.487.000	Rp7.726.177.996

b. Perbandingan Nilai BMN pada laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam Laporan Barang (SIMAK-BMN) dan Laporan Keuangan (SAKPA) pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2016 per akun Neraca adalah:

Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
Persediaan	Rp180.502.031	Rp180.502.031	Rp 0
Tanah	Rp22.560.845.000	Rp22.560.845.000	Rp 0
Peralatan & Mesin	Rp 5.695.122.551	Rp 5.695.609.551	Rp.487.000
Gedung & Bangunan	Rp15.539.111.990	Rp15.539.111.990	Rp 0
Jalan, Irigasi, & Jaringan	Rp180.921.000	Rp180.921.000	Rp 0
Aset Tetap Lainnya	Rp78.400.000	Rp78.400.000	Rp 0
KDP	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Aset Tak Berwujud	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Aset Lain-lain ^{*)}	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Akumulasi Penyusutan	(Rp7.725.690.996)	(Rp7.725.690.966)	Rp 0
Total	Rp36.509.211.576	Rp36.509.698.576	Rp.487.000

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, terdapat selisih penyajian nilai BMN antara Laporan Barang dan Laporan keuangan sebesar Rp.487.000,00 terjadi pada barang ekstrakomptabel yang tidak tercatat di neraca SAKPA

4. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama lima periode terakhir, dapat disajikan:

Periode	Nilai BMN	Perkembangan	
		Rupiah	Persen
2009	Rp 41.809.254.992	Rp 438.899.642	1,05 %
2010	Rp 41.988.202.903	Rp 178.947.911	0,426 %
2011	Rp 42.763.028.825	Rp 804.825.922	1,882 %
2012	Rp 40.795.559.283	(Rp 1.997.469.542)	-4,896%
2013	Rp 42.397.208.648	Rp 1.601.649.365	3,777 %
2014	Rp 42.389.229.222	Rp 180.580.000.	0,426 %
2015	Rp 43.560.309.591	Rp 1.683.295.481.	3,864 %
2016	RP 44.054.887.541	RP 439.910.000	0,998 %

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan

Nilai BMN pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2016 yang sudah ditetapkan status penggunaannya sebesar Rp32.798.144.551,00 pada kolom 2 sedangkan yang masih dalam proses penetapan di BPKP Pusat, KPKNL dan DJKN Palembang sebesar Rp. 10.029.478.000,00 pada kolom 3 :

Uraian	Sudah Ditetapkan	Belum Ditetapkan
I	2	3
Tanah	Rp22.560.845.000	Rp 0
Peralatan & Mesin	Rp5.695.122.551	Dalam proses
Gedung & Bangunan	Rp4.425.656.000	Rp9.894.178.800
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 38.121.000	Rp135.300.000
Aset Tetap Lainnya	Rp 78.400.000	Rp 0
Jumlah	Rp32.798.144.551	Rp10.029.478.000

b. Pengelolaan BMN Idle

Uraian	Jumlah
Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN idle	0 Unit
Ditetapkan sebagai BMN idle oleh Pengelola	0 Unit
Pemberitahuan bukan sebagai BMN idle oleh Pengelola	0 Unit
Telah diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan dari Pengguna	0 Unit
Selesai serah terima kepada Pengelola	0 Unit

3. BMN dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2016 tidak mengelola BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

4. BMN pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2016 tidak memiliki satuan kerja Badan Layanan Umum.

5. BMN Dari Dana Belanja Lain-lain (BA 999)

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2016 tidak mengelola BMN yang berasal dari Dana Belanja Lain-lain (BA 999).

6. Informasi Terkait BMN yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

a. Daftar Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2016 tidak memiliki BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang.

b. Daftar Barang Dengan Kondisi Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2016 memiliki BMN dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang.

7. BMN berupa BPYBDS

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 30 Juni 2016 tidak mengelola BMN berupa BPYBDS.

Informasi : Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penghapusan BMN selain tanah dan / atau bangunan pada Semester II tahun 2015 dengan jumlah 230 unit/buah dengan nilai sebesar Rp.393.480.945,00.

Pada laporan barang kuasa pengguna intrakomptable Per 31 Desember 2015 berkurang sebanyak 182 unit dengan nilai sebesar Rp346.641.056,00 dan pada laporan kuasa pengguna ekstrakomptable berkurang dengan nilai sebesar Rp9.796.100,00 adalah sebanyak 48 unit total tersebut sebanyak 230 Unit dengan nilai sebesar Rp356.437.156 dan total tersebut terjadi selisih angka BMN sebesar Rp37.043.789,00 karena terjadi akumulasi penyusutan.